

BAB II

GAMBARAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa. Tepatnya pada 5° 40' dan 8° 30' Lingkup Selatan dan 108° 30' dan 111° 30' Bujur Timur. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar. Dilihat dari posisi geografisnya, bagian utara dibatasi dengan laut jawa, bagian selatan dibatasi dengan Provinsi D.I Yogyakarta dan Samudra Hindia, bagian barat dibatasi dengan Provinsi Jawa Barat dan bagian timur dibatasi dengan Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.1

Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2021

Kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2020 adalah 1.113,27 jiwa/km². Jumlah penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 36.516.035 yang terdiri atas penduduk laki-laki sejumlah 18.362.143 dan penduduk perempuan sejumlah 18.153.892.

2.2 Anggota Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah

Pemilu 2019 mengantarkan sebanyak delapan partai politik yang menduduki kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah dan masih menempatkan PDIP sebagai partai politik dengan raihan kursi terbanyak. Jumlah anggota hasil Pemilu 2019 sebanyak 120 orang. Ada penambahan anggota sebesar 20 orang dibandingkan pemilu sebelumnya, yang sejak Pemilu 1982 sebanyak 100 orang. Bertambahnya kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut tidak berdampak pada penambahan jumlah anggota perempuannya, bahkan jika pada Pemilu 2014 terpilih 24 anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka pada Pemilu 2019 hanya ada 22 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah
(Pemilu 1971-2019)

No.	Pemilu	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Proporsi Perempuan %
1	1971	9	66	75	12%
2	1977	10	65	75	13,30%
3	1982	15	60	100	15%
4	1987	17	83	100	17%
5	1992	13	87	100	13%
6	1997	15	85	100	15%

No.	Pemilu	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Proporsi Perempuan %
7	1999	5	95	100	5%
8	2004	15	85	100	15%
9	2009	21	79	100	21%
10	2014	24	76	100	24%
11	2019	22	98	120	18,33%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (diolah).

Kedudukan atau posisi perempuan juga tidak menonjol dalam alat kelengkapan DPRD. Terdapat enam alat kelengkapan DPRD, yaitu pimpinan, komisi, badan kehormatan, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, dan badan anggaran.

Tabel 2.2
Bidang Tugas Alat Kelengkapan DPRD

Alat Kelengkapan	Bidang Tugas
Pimpinan	Tugas Pimpinan DPRD Provinsi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin sidang DPRD dan menentukan suatu keputusan; 2. Menyusun rencana kerja; 3. Melakukan komunikasi dengan alat kelengkapan DPRD lainnya; 4. Menjadi wakil DPRD dalam menyampaikan keputusan; 5. Melaksanakan putusan DPRD; 6. Menjadi wakil DPRD dalam bekerjasama dengan lembaga negara lainnya; 7. Melakukan perundingan dengan Presiden dan lembaga negara lainnya; 8. Menjadi wakil DPRD di pengadilan; 9. Menetapkan pengaturan keuangan DPRD beserta Badan Anggaran; dan 10. Menyampaikan presentasi kerja.

Komisi	
Komisi A	Bidang Pemerintahan meliputi administrasi pemerintah, keamanan dan ketertiban, penguatan wilayah lokal, penduduk dan pendaftaran umum, korespondensi dan informatika, hukum / pedoman, perizinan, masalah tanah, kepegawaian lokal, masalah legislatif sosial, asosiasi daerah setempat, dokumen dan perpustakaan, sumber daya provinsi, pendidikan dan persiapan tenaga kerja.
Komisi B	Bidang Perekonomian meliputi industri, dagang, agribisnis, perikanan dan kelautan, budidaya dan kesejahteraan makhluk hidup, perkebunan, perhutanan, industri perjalanan, ketahanan dan koordinasi pangan, usaha penanaman modal, serta koperasi UKM dan dunia usaha.
Komisi C	Bidang Keuangan meliputi keuangan daerah, penilaian pajak, biaya retribusi, perbankan, usaha milik negara, usaha bersama dan penanaman modal dan organisasi bantuan umum.
Komisi D	Bidang Pembangunan meliputi kemajuan golongan, karya imajinatif, penataan permukiman dan tata ruang, penginapan umum, pengelola aset air, transportasi, pertambangan, aset energi dan mineral, serta iklim.
Komisi E	Bidang Kesejahteraan Rakyat mencakup tenaga kerja, pengajaran, sains, karya inovatif inovasi, pemuda dan olahraga, agama, budaya, sosial, kesejahteraan, imigrasi, penguatan perempuan, jaminan anak dan kontrol populasi.
Badan Kehormatan	Tugas Badan Kehormatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyaring dan menilai kedisiplinan atau potensi kesesuaian dengan etika untuk menjaga keluhuran, kehormatan, citra, dan kepercayaan DPRD; 2. Memeriksa tuntutan pelanggaran yang diajukan oleh oknum DPRD terhadap Asas atau potensi kode etik DPRD; 3. Pemeriksaan, pengukuhan dan penjelasan langsung atas protes dari pejabat DPRD, perseorangan DPRD, atau berpotensi masyarakat umum; dan 4. Melaporkan pilihan Badan Kehormatan atas akibat pemeriksaan, pengukuhan, dan penjelasan yang dimaksud dalam huruf c.
Badan Musyawarah	Tugas Bamus: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memutuskan rencana DPRD untuk rapat 1 (satu) tahun, 1 (satu) kali pengujian, atau sebagian dari periode rapat, penilaian waktu penuntasan masalah,

	<p>dan waktu pembuatan Raperda;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan perspektif akan pimpinan DPRD dalam memperkuat pengaturan sehubungan dengan kewajiban dan keahlian DPRD; 3. Menyebutkan dan memberi keleluasaan pada alat kelengkapan DPRD lainnya untuk memberi data/klarifikasi perkara pelaksanaan kewajiban khususnya; 4. Memutuskan rencana rapat DPRD; 5. Memberikan ide/penilaian untuk dikerjakan dengan latihan; 6. Mengusulkan pembentukan Panitia Khusus, Panitia Angket dan Panitia Kerja; 7. Menyelesaikan berbagai urusan yang dibagikan ketika Rapat Paripurna.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	<p>Tugas Bapemperda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur Rancangan Program Penyusunan Perda yang mencakup rundown permintaan dan kebutuhan Rancangan Perda bersama penjelasan; 2. Koordinasi perencanaan Program Pengembangan Perda dengan Pemerintah Daerah; 3. Menyiapkan Rancangan Perda; 4. Menyesuaikan, mengikat, dan memantapkan asal usul Rancangan Perda; 5. Memperhatikan dan memepertimbangkan Rancangan Perda; 6. Mengikuti penyempurnaan dan penilaian pembahasan substansi Rancangan Pergub; 7. Menyampaikan saran pada pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda; dan 8. Menyampaikan presentasi kerja menjelang selesainya masa jabatan DPRD.
Badan Anggaran	<p>Tugas Banggar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan gagasan dan penilaian sebagai rencana utama DPRD kepada Gubernur dalam penyusunan Rancangan APBD; 2. Melakukan perundingan yang ditujukan oleh individu-individunya pada Komisi terkait guna mendapat saran sehubungan dengan mengkaji Rancangan Strategi Umum Rencana Keuangan Daerah serta Rencana Kebutuhan dan Belanja Tidak Tetap; 3. Memberikan ide kepada Gubernur dalam menyusun Raperda Perubahan Rencana Belanja Daerah dan Raperda Provinsi Pelaksanaan Rencana Keuangan Daerah;

	<p>4. Penyempurnaan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Keuangan Daerah;</p> <p>5. Meneliti bersama Kelompok Rencana Keuangan Pemerintah Daerah;</p> <p>6. Memberikan nasihat atas Pimpinan DPRD dalam perencanaan rencana belanja DPRD.</p>
--	---

Sumber : DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2021.

Tabel berikut menjelaskan posisi perempuan dalam semua alat kelengkapan DPRD yang menunjukkan pada semua alat kelengkapan, kecuali komisi, tidak ada perempuan di posisi strategis sebagai unsur pimpinan. Adapun dari lima komisi terdapat satu jabatan wakil ketua dan dua sekretaris yang dipegang anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.3
Data Pilah Anggota Alat Kelengkapan
Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah

Alat Kelengkapan	Anggota			Jabatan Perempuan
	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	
Pimpinan	0	5	5	
Komisi				
Komisi A	4	18	22	Sekretaris
Komisi B	5	17	22	Wakil Ketua
Komisi C	4	19	23	
Komisi D	3	20	23	
Komisi E	6	16	22	Sekretaris
Badan Kehormatan	0	8	8	
Badan Musyawarah	5	27	32	
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	5	16	21	
Badan Anggaran	6	31	37	

Sumber : DPRD Provinsi Jawa Tengah, 2021.

Selain alat kelengkapan anggota DPRD Jawa tengah terhimpun dalam fraksi. Ada sebanyak delapan fraksi di DPRD Jawa Tengah. Dari delapan fraksi tersebut hanya fraksi PPP yang menempatkan perempuan di posisi pimpinan, yakni sebagai sekretaris fraksi.

2.3 Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Jawa Tengah

Jawa Tengah menempati posisi tertinggi di Indonesia untuk jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.²⁶ Berikut jenis kekerasan yang dialami :

Tabel 2.4
Jenis Kekerasan yang dialami Perempuan (Usia 18+ Tahun)
Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah, 2015-2018

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kekerasan			
		2015	2016	2017	2018
1	Fisik	489	569	549	565
2	Psikis	410	461	355	409
3	Seksual	87	136	70	122
4	Penelantaran	67	208	193	201
5	Trafficking	5	6	4	38
6	Eksplorasi	36	10	1	8
7	Lainnya	196	33	38	43
Total		1290	1423	1210	1386

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020.

Tahun 2015 jumlah kekerasan yang dialami perempuan usia 18+ tahun tercatat 1.290 kasus, tahun 2016 meningkat menjadi 1423 kasus. Tahun 2017 sempat turun, namun tahun 2018 meningkat menjadi 1.386

²⁶Hanung Soekendro, *Loc. Cit.*

kasus, dan tahun 2019 menjadi 1.649 kasus. Namun demikian, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Asteria Dewirusrinawati mengungkapkan bahwa tingginya jumlah kasus kekerasan perempuan menunjukkan tingginya kesadaran korban untuk melapor. Hal ini sesuai dengan pernyataannya yaitu:

Angka kekerasan di Jawa Tengah itu memang tinggi, tapi bukan berarti itu negatif, bisa jadi hal tersebut dikarenakan pencegahan massif akhirnya orang menyadari jika mereka yang mengalami kekerasan itu lapor akhirnya datanya meningkat. Jika lapor ke Pusat Pelayanan Terpadu hal ini menyebabkan data kekerasan perempuan tinggi. Saat ini sudah ada beberapa SPT-PPA di Semarang sampai kelurahan. Sistemnya merujuk. Misal dari kota jika perlu dirujuk akan dirujuk ke provinsi. Jadi kabupaten kota juga diberdayakan (wawancara dengan Asteria Dewirusrinawati, tanggal 04 Maret 2021).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tingginya jumlah kasus kekerasan perempuan dapat dianggap positif dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor ketika terjadi kekerasan. Adapun jenis kekerasan yang dominan di setiap tahunnya adalah kekerasan fisik. Dari pendataan dan pemetaan yang dilakukan oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, kekerasan pada perempuan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dan faktor pendidikan pelaku.